

**TUGAS MATA KULIAH  
SOSIOLOGI POLITIK**

**TUGAS RESUME**

**“MEMAHAMI SOSIOLOGI POLITIK”**



**DISUSUN OLEH :**

**1. Ruben Ferdinand (4115115866)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2014**

**A. Pengertian Sosiologi Politik**

Sosiologi Politik adalah Ilmu tentang kekuasaan pemerintahan otoritas, komando dalam semua masyarakat manusia yang bukan saja masyarakat nasional, tetapi juga dalam masyarakat lokal dan masyarakat lainnya. Sosiologi politik merupakan sebagai ilmu Negara berarti menempatkannya dalam klasifikasi ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat-masyarakat yang dipelajari. Konsep lain yang lebih modern menganggap bahwa dari sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas komando, di dalam semua masyarakat manusia, bukan saja di dalam masyarakat nasional.

Menurut Duverger (2005), dilihat dari ukuran (*size*) dan kompleksitasnya, ada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok elementer atau kelompok kecil dan kelompok kompleks. Kekuasaan dalam kelompok yang lebih besar inilah yang ada sangkut pautnya dengan sosiologi politik, sedangkan pada kelompok-kelompok yang kecil menjadi wilayah kajian psikologi sosial.

**B. Perkembangan Sosiologi Politik**

Perkembangan sosiologi politik dapat ditelusuri dari karya-karya pemikir ilmu-ilmu sosial. Karya sosiologi pertama dapat ditemui dalam buku Montesquie yang pernyataannya bahwa, “Di sini kita laporkan apa yang ada dan bukan apa yang seharusnya ada. Selanjutnya sosiologi politik diungkapkan oleh beberapa pemikir lainnya seperti Rush dan Rudolf, Karl Marx dengan masyarakat tanpa kelas yang dianggap menonjol karena karyanya yang paling mendasar dalam sosiologi politik, Selanjutnya ada pula seorang tokoh yang menonjol juga peranannya dalam sosiologi politik yakni Max Weber karya yang paling terkenal adalah sistem kapitalis dan individualis. Dan tokoh lainnya Walter Bagehot dan juga Gabriel Tarde, serta tokoh penyumbang yang menyinggung partai politik yakni Ostrogorsi dan Robert Michels. Dan Harold Laswell yang memusatkan kaitannya antara kebudayaan dengan politik, serta hubungan ekonomi dengan sistem-sistem politik.

**C. Pendekatan dan Peranan Sosiologi Politik****1. Pendekatan dan Metode**

Pendekatan adalah orientasi khusus atau titik pandang tertentu yang digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Berdasarkan batasan-batasan ini Rush dan Althoff (2005), mengemukakan beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Pendekatan

tersebut yakni, Pendekatan Historis; Pendekatan Komparatif (Perbandingan); Pendekatan Institusional; Pendekatan Behavioral; Pendekatan Plural; Pendekatan Struktural; Pendekatan Developmental. Disamping pendekatan, terdapat pula beberapa metode yang digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Metode-metode tersebut di antaranya Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data kuantitatif maupun kualitatif sebagaimana disebutkan diatas dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya melalui teknik, Wawancara Intensif (mendalam); Studi-studi kasus (*case studies*); Observasi (pengamatan); Angket.

### 3. Peranan Sosiologi Politik

Sebagai ilmu, sosiologi politik mempunyai peranan dan manfaat dan itu bukan hanya bagi perkembangan ilmu itu sendiri, melainkan juga bagi kehidupan manusia atau masyarakat pada umumnya.

## **BAB II**

## **KEKUASAAN, WEWENANG, DAN KEPEMIMPINAN**

---

### **A. Kekuasaan**

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Aspek kekuasaan itu selalu muncul dalam kekuasaan politik dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan sebagai sumber konflik dan perpecahan selalu disertai oleh kekuasaan sebagai alat pemersatu (integrasi).

Terdapat jenis-jenis dalam kekuasaan, yakni meliputi monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan mobokrasi (Miriam, 2008; Carlton, 2002). Dan John R.P. French dan Bertram Raven mengidentifikasi ada lima bentuk kekuasaan yang dirasakan dan dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: Kekuasaan sah, Kekuasaan paksa, Kekuasaan penghargaan, Kekuasaan kepakaran, Kekuasaan rujukan. Dan dalam mempertahankan kekuasaannya pemimpin melakukan berbagai cara yakni penguasa membuat peraturan-peraturan agar kedudukannya lebih kokoh dan mengadakan konsolidasi untuk melanggengkan kekuasaannya.

### **B. Wewenang**

Wewenang menurut Sukanto diartikan sebagai suatu hak yang ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.

Ada beberapa bentuk wewenang, Max Weber menyatakan ada tiga wewenang yaitu Karismatik, yakni wewenang yang berdasarkan kemampuan khusus yang ada pada diri seorang yang melekat karena anugerah Tuhan YME; Tradisional, yakni wewenang yang didasarkan atas keyakinan pada kesucian tradisi yang sudah berjalan lama dan sah dalam pelaksanaan otoritas (kekuasaan); dan Legal, yakni wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat atau didasarkan pada kompetensi fungsional yang dilandasi pada peraturan-

peraturan yang dibuat secara rasional dan resmi. Sedangkan ada pula kata legitimasi dalam wewenang, legitimasi itu berarti keabsahan individu atau kelompok tertentu pemegang mandate kekuasaan.

### **C. Kepemimpinan**

Menurut Soerjono Soekanto, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang, yaitu pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpinnya, sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Sebagaimana wewenang, kepemimpinan juga mempunyai tipe yakni Kepemimpinan yang bersifat resmi (*formal leadership*) dan tidak resmi (*Informal Leadership*). Ngali Purwanto (1998) mengemukakan bahwa ada beberapa sumber yang memunculkan seorang menjadi pemimpin, yakni antara lain: sifat-sifat seseorang; tradisi; kekuatan (magis); prestise; kebutuhan yang bersifat tradisional; kecakapan khusus; secara kebetulan mengisi tempat lowong.

Berdasarkan karakter, gaya, tingkah laku yang khas unik pada masing-masing pemimpin, kepemimpinan dapat dibedakan atas beberapa tipe, yaitu Tipe karismatis; Tipe paternalistik/maternalistik; Tipe militeristik; Tipe otokratis; Tipe *laissez faire*, Tipe populistis; Tipe administratif atau eksekutif; dan Tipe Demokratis.

## **BAB III      SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK**

---

### **A. Sistem Politik**

Sistem politik adalah salah satu sistem dari berbagai sistem yang ada di masyarakat, yang lain diantaranya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem budaya, dan sistem hukum. Menurut David Easton, ada beberapa ciri utama sistem politik, yaitu: Ciri-ciri identifikasi; Adanya *input* dan *output*; Adanya diferensiasi dalam sistem; Integrasi dalam sistem.

Dalam rangka memperluas dukungan, ada tiga sasaran penting dalam sistem politik yaitu: Komunitas Politik, yaitu kumpulan anggota suatu sistem politik baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung; Rezim, yaitu sistem atau aturan permainan yang menentukan mekanisme

kerja sistem politik yang ditaati oleh anggota-anggotanya; Pemerintah, yaitu kelompok tertentu yang memegang kekuasaan.

### **B. Struktur Politik**

Kehidupan politik suatu negara terlihat dari sistem politik yang mewujudkan dalam struktur politik. Secara umum struktur politik menggambarkan hubungan antara lembaga-lembaga politik yang membentuk struktur politik.

Sebagaimana dijelaskan diatas, struktur politik mewujud dalam beberapa lembaga politik seperti: Badan legislatif, yaitu lembaga yang bersifat “*legislate*” atau membuat undang-undang dan anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat yang oleh karenanya disebut Dewan Perwakilan Rakyat; Badan Eksekutif, adalah lembaga politik yang menjalankan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang; Badan Yudikatif, yaitu badan yang menjalankan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman; Partai Politik, adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama; Kelompok Kepentingan, yaitu sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Gabriel A.Almond mengatakan bahwa ada beberapa jenis kelompok kepentingan, yaitu:

- **Kelompok Anomik:** kelompok yang terbentuk oleh unsure-unsur dalam masyarakat secara spontan atau hanya seketika.
- **Kelompok Non-Asosiasional:** Kelompok yang memiliki kesamaan dengan kelompok anomik, yaitu tidak terorganisasi.
- **Kelompok Instutusional:** Kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau social, selain artikulasi kepentingan.
- **Kelompok Asosiasional:** Kelompok yang berkepentingan secara khusus, menggunakan staff professional, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingannya.

## **BAB IV      BIROKRASI DAN REKRUTMEN POLITIK**

---

### **A. Birokrasi**

Birokrasi menurut Weber menunjukkan pada suatu organisasi di mana adanya pengerahan tenaga dengan teratur dan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian

birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkis yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinasi pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.

Birokrasi dalam konteks di Indonesia adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga nondepartemen, baik di pusat maupun di daerah, seperti di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan.

Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau misi yang mendasari suatu organisasi birokrasi, sekurang-kurangnya menurut Abdullah dapat dibedakan menjadi tiga kategori berikut.

- a. Birokrasi Pemerintah Umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah, yaitu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat “mengatur” atau *regulative-function*.
- b. Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industry. Fungsi pokoknya adalah *development function* atau *adaptive function*.
- c. Birokrasi Pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah *service* (pelayanan) langsung kepada masyarakat.

Over birokratisasi cenderung mengakibatkan anggota unit kerja menjadi lamban dan apatis. Organisasi menjadi berat di atas dan secara ekonomi, unit kerja menjadi tidak efisien, akhirnya mengakibatkan menurunnya moral bawahan atau para pengikut. Dengan demikian, kegiatan kerja terutama dalam bentuk unit kerja yang terorganisasikan secara sistematis selalu membutuhkan pemimpin dan kepemimpinan yang baik, kuat, dihormati, dikagumi.

Pembangunan budaya birokrasi adalah suatu langkah penting dan lebih utama dibanding pembaharuan yang hanya bersifat struktural. Di dalamnya terkandung berbagai unsur, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, birokrasi harus mengembangkan keterbukaan (*transparency*). *Kedua*, kebertanggungjawaban (*accountability*). *Ketiga*, birokrasi harus membangun partisipasi. *Keempat*, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan member

menjadi memberdayakan (*empowering*). *Kelima*, birokrasi hendaknya tidak berorientasi kepada yang kuat tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya (*the underprivileged*).

## **B. Rekrutmen Politik**

Ramlan Subakti (2003) memberi pengertian, bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Dalam praktiknya, proses rekrutmen politik selalu bermakna ganda. *Pertama*, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepada negara, dan kepala daerah. *Kedua*, menyangkut transformasi peran-peran nonpolitik warga yang berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik. Disamping itu, proses rekrutmen politik merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal.

Bentuk-bentuk atau sistem rekrutmen politik tentu saja memiliki keragaman yang sangat banyak. Beberapa sistem perekrutan dalam rekrutmen politik, menurut Philip Althoff dan Michael Rush (2005), yakni:

- a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan
- b. Seleksi melalui penyortiran
- c. Seleksi melalui rotasi atau giliran
- d. Seleksi melalui Perebutan kekuasaan
- e. Seleksi dengan cara *patronage* (penyuapan)
- f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah
- g. Seleksi melalui koopsi

Dalam upaya mengisi suatu jabatan politik maupun jabatan administratif, tidak terlepas dari adanya peranan partai politik yang dianggap mampu menyediakan personel-personel yang dibutuhkan dalam suatu jabatan politik. Dalam hal ini, Zarakasih Nur (Cetro, 2004) mengatakan, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, di mana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan



politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen politik maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul dikdatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut.

Dengan demikian, partai politik harus mengupayakan penyiapan kader-kader politik yang sangat dibutuhkan dalam proses rekrutmen politik. Pengertian kader, menurut Bambang Yudhoyono, (2001) adalah sebagai berikut.

- Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas
- Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada di bawah control organisasi.
- Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik.

Menurut Bambang Yudhoyono, (2001), ada enam langkah yang dapat ditempuh oleh partai politik dalam upaya menyiapkan kader-kader politik yang berkualitas yang akan di perankan di masa-masa mendatang, khususnya dalam mengisi jabatan politik negara, antara lain sebagai berikut.

- Tahap Pertama (Rekrutmen Kader)
- Tahap Kedua (Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader )
- Tahap Ketiga (Penugasan)
- Tahap Keempat (Menyelenggarakan kursus kader tingkat lanjutan)
- Tahap Kelima (Kepeloporan)
- Tahap Keenam (Pelibatan dalam acara diskusi dan seminar)

## ***BAB V            BUDAYA POLITIK***

---

### **A. Konsepsi Budaya Politik**

Menurut E.B Taylor (Koentjaraningrat, 2002), kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Secara konseptual, Almond dan Verba (2005) mendefinisikan, budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu.

Dikatakan oleh Almond dan Verba, di dalam objek yang terfokus pada sistem politik terdapat tiga komponen yang saling menunjang, yaitu:

1. Komponen Kognitif: pengetahuan dan kepercayaan pada politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang diambil, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan output.
2. Komponen Afektif: perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima dan menolak sistem politik itu, peranannya, para aktor dan penampilannya.
3. Komponen Evaluatif: keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal (khas) melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan yang memang telah dipunyai seseorang.

Objek orientasi politik dapat digolongkan dalam beberapa unsur, yaitu:

- Sistem sebagai objek umum,
- Objek-objek input
- Objek-objek output, dan
- Pribadi sebagai objek

## **B. Tipe-Tipe Budaya Politik**

### **1. Budaya Politik Parokial**

Tipe budaya politik ini adalah budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah. Orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional. Mereka ini mungkin buta huruf, tinggal di desa yang terpencil, atau mungkin nenek-nenek tua yang tidak tanggap terhadap hak pilih.

### **2. Budaya Politik Subjek**

Orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Masyarakat dan individunya telah mempunyai perhatian dan minat terhadap sistem politik. Meski peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menerima kebijakan tersebut dengan pasrah. Tidak ada keinginan untuk menilai, menelaah atau bahkan mengkritisi.

### 3. Budaya Politik Partisipan

Orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (voting), dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan politik. Budaya Politik Partisipan merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (berupa pemberian dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (melaksanakan, menilai dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

### **C. Budaya Politik di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang majemuk dalam arti budaya dan geografinya, keanekaragaman itu sudah pasti membawa pengaruh yang besar pada budaya politik bangsa kita. Menurut Herbert Feith, yang dikutip oleh Nazarudin Syamsudin (1991), Indonesia mempunyai dua politik yang dominan, yaitu aristokrasi Jawa dan wiraswasta Islam.

Proses pematangan budaya politik Indonesia pada dasarnya melibatkan suatu tahap penyerasian antara sub-subbudaya politik dengan struktur politik nasional, di mana subbudaya politik lebih dominan daripada struktur politik nasional karena subbudaya politik merupakan orientasi politik yang matang, dalam arti sudah terjadi kesesuaian antara aspek-aspek budaya daerah dengan struktur politiknya. Subbudaya politik yang sudah kuat inilah yang hendak diserasikan dengan struktur politik nasional yang baru tumbuh dan dikembangkan sejak Indonesia merdeka.

Peranan adat dan agama dalam proses pengukuran orientasi politik sangat penting karena adat dan agama mempunyai fungsi dalam proses penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat. Peranan adat dan agama dalam proses pengukuran orientasi politik sangat penting karena adat dan agama mempunyai fungsi dalam proses penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat mengenai kekuasaan. Sedangkan di bidang non institusional, adat dan agama telah memberi bentuk pada sikap/pandangan individu anggota masyarakat tentang peranannya yang mungkin dijalankan dalam sistem politik.

Secara khusus yang menjadi persoalan di negara ini adalah bagaimana kepentingan-kepentingan yang berdasarkan sekian banyak subbudaya politik dapat dipertemukan atau setidaknya tidaknya didekatkan. Hal seperti ini biasa terjadi di negara-negara berkembang yang tidak memiliki budaya politik nasional yang matang, sehingga pimpinan nasional harus pandai membawa diri, sebab ancaman dalam berbagai bentuk senantiasa mengintai untuk mengguncang stabilitas politik. Proses pematangan budaya politik Indonesia dapat ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya adalah lewat kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Secara teoritis, budaya politik berfungsi menumbuhkan kesetiaan dan pengakuan rakyat terhadap hak-hak negara, disamping mengarahkan menuju terciptanya konsensus normatif.

Secara khas, budaya politik Indonesia disebut budaya demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang didasarkan pada filosofi bangsa dan sekaligus dasar negara Republik Indonesia. Menurut Moerdiono, ada enam masalah pokok yang berkaitan erat dengan budaya politik demokrasi Pancasila, yaitu:

1. Sosialisasi, Internalisasi, dan Institusionalisasi Pancasila
2. Persepsi tentang Kekuasaan
3. Posisi Agama dan Kebudayaan Daerah
4. Integrasi antar- Elite Politik
5. Integrasi antar-Elite Politik
6. Integrasi Elite-Massa
7. Masalah Pemerataan dan Keadilan

## **BAB VI      PARTISIPASI POLITIK**

---

### **A. Konsep Partisipasi Politik**

Menurut Gabriel Almond (1999), partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Tetapi partisipasi politik diawali oleh adanya artikulasi kepentingan di mana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik. Sedangkan Huntington dan Nelson (1995), memberikan definisi bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

## **B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bentuk umum dari partisipasi politik adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu). Bentuk-bentuk partisipasi politik yang lebih lengkap dikemukakan oleh Rush dan Althoff. Keduanya memvisualisasikan bentuk-bentuk partisipasi politik secara hierarkis seperti berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administrasi
2. Mencari jabatan politik atau administrasi
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
9. Voting (pemberian suara)
10. Apatitis total

## **C. Fungsi Partisipasi Politik**

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individu maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane (Rush dan Althof, 2005) dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu.

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

## **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu di pengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Menurut Frank Lindenfeld, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutanpun akan menjadi apatis.

Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, *Pertama*, aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan social dan kewajiban-kewajiban, seperti dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. *Kedua*, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Weimar (Sastroatmodjo, 1995) menyebutkan, paling tidak ada lima faktor berikut yang mempengaruhi partisipasi politik.

1. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa, dan media komunikasi.
2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa.
4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik.
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

## ***BAB VII      SOSIALISASI POLITIK***

---

### **A. Konsep Sosialisasi Politik**

Michael Rush dan Philip Althof (2005) menyatakan, ada beberapa segi penting dari sosialisasi. *Pertama*, sosialisasi secara fundamental merupakan hasil belajar, belajar dari

pengalaman. *Kedua*, hasil belajar itu berupa tingkah laku individu yang mencakup batas-batas yang luas, khususnya mengenai pengetahuan atau informasi, motif-motif atau nilai-nilai dan sikap-sikap. Tingkah laku itu bukan hanya tingkah laku individu saja, melainkan pula tingkah laku kelompok, dimana individu tersebut menjadi bagian daripadanya. *Ketiga*, sosialisasi itu tidak terbatas pada masa anak-anak atau remaja saja, melainkan berlangsung sepanjang kehidupan. *Keempat*, sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial dan secara implisit dan eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

Sosialisasi politik, menurut Almond (Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, 2001), bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik menunjukkan pada proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik.

Sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga, beberapa lembaga atau agen sosialisasi politik seperti; Keluarga, Sekolah, Kelompok Pergaulan, Pekerjaan, Media Massa, Kontak-kontak politik langsung.

## **B. Tahapan Sosialisasi Politik**

Tahapan sosialisasi yang dimaksud dalam subtopik ini adalah fase-fase sosialisasi politik yang dialami manusia sepanjang hidupnya, yakni:

1. Sosialisasi Politik pada Masa Anak-Anak dan Remaja  
Seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak juga semakin bertambah tanggap dalam mereaksi situasi-situasi khusus dan seluruh pandangan mereka menjadi semakin berpautan dan semakin total, berbeda dengan sebelumnya yang masih bersifat terpisah-pisah dan terbatas.  
Dari hasil riset, Easton dan Dennis mengutarakan empat tahap dalam sosialisasi politik pada diri anak-anak, yaitu sebagai berikut.
  - a) Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang-tua, presiden, dan polisi.
  - b) Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintahan.

- c) Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres, mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilihan umum).
- d) Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini, sehingga gambaran yang diidealkan mengenai pribadi-pribadi khusus seperti presiden atau seorang kongres telah dialihkan kepada kepresidenan dan kongres.

Sosialisasi pada masa anak-anak sangat dipengaruhi oleh peranan keluarga. Sebagaimana diketahui dan telah dijelaskan di depan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi yang penting dan awal. Robert Lane mengemukakan bahwa terdapat tiga kepercayaan politik yang dapat diletakkan melalui dan di dalam keluarga, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan indoktrinasi terbuka (*overt*) dan indoktrinasi tertutup (*covert*)
- b. Dengan jalan menempatkan anak dalam satu konteks sosial khusus.
- c. Dengan jalan membentuk kepribadian anak.

Selain keluarga, pendidikan telah lama dipandang sebagai satu variabel penting dalam kegiatan menjelaskan tingkah laku politik, dan terdapat banyak pembuktian tidak langsung yang menyatakan bahwa pendidikan ini penting sebagai agen sosialisasi politik.

## 2. Sosialisasi Politik pada Masa Dewasa

Sosialisasi politik pada orang dewasa bisa merupakan kelanjutan atau merupakan sesuatu yang berbeda dari masa sebelumnya. Dalam perkembangan dari masa anak-anak ke masa remaja diantarkan secara bertahap melalui kontak dengan dunia di sekitar dirinya. Demikian pula perubahan dari masa remaja menjadi dewasa, menunjukkan adanya suatu tahap lainnya yang penting dalam sosialisasi politik. Beberapa kontak yang dijalin selama masa anak-anak dan masa remaja ada yang berkelanjutan dalam bentuk yang agak mirip melalui *persahabatan* dan *perkenalan*, sedang yang lainnya dapat diteruskan atau diperbaharui seperti *pekerjaan*, *kesenggangan*, *agama*, atau *media massa*. Bagi beberapa orang, pengalaman-pengalaman baru ini akan memperkuat orientasi politik yang telah terbentuk sebelumnya.



Pengaruh nyata lingkungan terhadap orientasi politik orang dewasa terlihat dari hasil penelitian tentang pemilihan umum yang menemukan hubungan antara pilihan partai dengan ciri-ciri karakteristik para pemberi suara berkaitan dengan lingkungan dan pengalamannya. Dan juga persahabatan diantara beberapa orang sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politik seseorang.

### **C. Sosialisasi Politik pada Berbagai Tipe Masyarakat**

#### **1. Sosialisasi Politik pada Masyarakat Demokratis**

Sosialisasi politik di negara-negara demokratis berlangsung lebih terbuka tanpa kontrol negara yang ketat. Cara-cara dan saluran-saluran sosialisasi politik di negara-negara demokratis lebih bervariasi dengan melibatkan sebanyak mungkin peranan masyarakat sehingga proses sosialisasi berlangsung lebih demokratis dan efektif.

#### **2. Sosialisasi Politik pada Masyarakat Totaliter**

Dalam negara yang totaliter, ideology negara menjadi basis resmi bagi semua tindakan dan semua aktivitas. Sosialisasi politik tidak dapat mencari salurannya sendiri. Selain itu, tidak ada pemberian pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang tidak terkontrol, yang mungkin bisa menentang ideology yang bersangkutan. Pola pikir dan mentalist warga negara dilebur, dituntun, dan dikekang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan negara lewat wahana dari ideologinya.

#### **3. Sosialisasi Politik pada Masyarakat Berkembang**

Robert Le Vine (Rush dan Althof, 2005) berpendapat, sosialisasi politik di negara-negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat pada sistem-sistem local, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional. Le Vine mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting penting dalam sosialisasi politik di tengah-tengah masyarakat demikian.

- a. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisional lewat industrialisasi dan pendidikan.

- b. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai-nilai tradisional.
- c. Pengaruh urbanisasi, yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional, paling sedikitnya secara parsial juga terimbangi oleh peralihan dan nilai-nilai ke dalam daerah-daerah perkotaan, khususnya dengan pembentukan komunitas-komunitas kesukuan dan etnis di daerah-daerah ini.
- 4. Sosialisasi Politik pada Masyarakat Primitif  
Pentingnya tradisi-tradisi, penekanan terhadap teknik-teknik sosialisasi sangat ritual, inisiasi, dan penekanan yang berulang-ulang pada hierarki dan status yang kita dapati dalam masyarakat-masyarakat primitif, merupakan mata-rantai penting antara mereka dengan masyarakat dengan masyarakat modern.

## **BAB VIII      KOMUNIKASI POLITIK**

---

### **A. Konsepsi Komunikasi Politik**

Gabriel Almond berpendapat bahwa, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Pengertian sederhana dari komunikasi politik adalah transmisi informasi yang relevan secara politis dari suatu bagian sistem politik kepada bagian sistem yang lain, dan antara sistem politik dengan sistem-sistem yang lain. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “*yang memerintah*” dan “*yang diperintah*”. Pada dasarnya terdapat dua macam konsep komunikasi, yaitu:

- a. Konsep yang ada kaitannya dengan (struktur) kerja;
- b. Konsep yang memusatkan perhatian pada berbagai arus dan proses.

### **B. Bentuk-bentuk Komunikasi Politik**

#### **1. Opini Publik**

Opini publik dilukiskan sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang mengandung konflik, perbantahan, perselisihan pendapat tentang apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Opini publik akan memunculkan citra personal seorang tentang politik mengenai suatu interpretasi yang akan menghasilkan opini pribadi. Setiap opini merefleksikan organisasi yang kompleks yang terdiri atas

- tiga komponen yaitu kepercayaan, nilai dan pengharapan. Dalam konteks ini, publik dan politik pencitraan adalah dua hal yang inheren dalam komunikasi politik.
2. Kampanye  
Roger dan Storey (dalam Venus, 2007) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Menurutnya, setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni: (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, (2) jumlah khalayak sasaran yang besar, (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu, (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.
  3. Propaganda  
Propaganda adalah suatu tindakan manipulatif untuk mempengaruhi keputusan atau perilaku individu atau negara lain. Propaganda dilakukan dengan hanya bermodalkan kemampuan olah wicara. Dengan diksi yang hebat, nada dan intonasi yang tepat, gestur dan gestikulasi yang memikat, seorang orator dapat mempengaruhi kahalayak dengan cepat.

### **C. Fungsi Komunikasi Politik**

Dilihat secara umum, fungsi komunikasi politik pada hakikatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interpendensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat tinbal balik atau dalam pengertian lain, saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

## ***BAB IX PERUBAHAN POLITIK DAN GERAKAN SOSIAL***

---

### **A. Perubahan Politik**

Perubahan politik adalah perubahan mencakup perubahan pemerintah atau perubahan rezim, atau perubahan yang mencakup keduanya. Perubahan rezim akan menghasilkan suatu transformasi sosial yang besar. Perubahan tersebut ditandai dengan penggantian cara-cara lama dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara dengan cara-cara baru dan ditandai pula dengan upaya untuk meredefinisikan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan anggota-anggotanya.

Tom Bottomore (1992) menyatakan bahwa perubahan-perubahan politik yang cukup berarti dapat disebabkan oleh beberapa faktor: (a) diperkenakannya teknologi baru, (b) perdagangan atau peperangan, (c) kudeta istana, (d) perubahan dinasti, (e) tampilnya raja yang kompeten atau tidak kompeten, (f) munculnya pemimpin politik yang kharismatik, (g) adanya gerakan-gerakan cultural dan intelektual, dan (h) pasang surutnya kelompok-kelompok sosial tertentu, termasuk para elite yang memiliki kepentingan social yang berbeda.

Adanya beberapa tipe perubahan politik, selain perubahan-perubahan politik yang rutin dan perubahan politik yang nonrutin atau disrupsi terdapat beberapa tipe perubahan politik yang lain, yakni sebagai berikut:

- a. Perubahan gradual dan perubahan secara mendadak.
- b. Perubahan besar dan perubahan kecil.
- c. Perubahan dengan kekerasan dan perubahan dengan damai.

## **B. Gerakan Sosial**

Menurut Goldstone (2003), gerakan sosial merupakan bentuk alternatif atau semacam terobosan dari demokrasi representasi formal melalui tiga tiang utama demokrasi; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Makin mapan sebuah demokrasi, makin memberikan peluang dan marak gerakan sosial ketika terjadi kemacetan aspirasi dalam representasi formal.

Diani (2000) menekankan pentingnya empat unsur utama dalam gerakan sosial, yaitu (1) jaringan kuat, tetapi interaksi bersifat informal atau tidak terstruktur. Dengan kata lain, ada ikatan ide dan komitmen bersama di antara para anggota atau konstituen gerakan itu meskipun mereka dibedakan dalam profesi, kelas sosial, dan lain-lain; (2) ada *sharing* keyakinan dan solidaritas di antara mereka; (3) ada aksi bersama dengan membawa isu bersifat konfliktual, ini berkaitan dengan penentangan atau desakan terhadap perubahan tertentu; (4) aksi tuntutan ini bersifat berkelanjutan, tetapi tidak terinstitusi dan mengikuti prosedur rutin, seperti dikenal dalam organisasi agama.

## **C. Kekuatan Politik**

Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari perubahan politik adalah adanya kekuatan yang berperanan dalam melakukan perubahan politik yang sederhananya disebut gerakan sosial,

sedangkan gerakan sosial itu merupakan kekuatan politik masyarakat untuk mencapai tujuannya. Kekuatan politik disebut juga agen perubahan. Dari berbagai studi telah diidentifikasi, ada beberapa agen atau kekuatan yang berperan melakukan perubahan politik dan gerakan sosial, di antaranya negara, dinasti, organisasi sosial politik dan organisasi nonpemerintahan (organisasi kemasyarakatan), kelas menengah, elite dari berbagai golongan, kelompok generasional (khususnya generasi muda), kelompok etnis, kelompok budaya, dan kaum intelektual. Mereka memainkan peranan yang sangat menentukan bagi perubahan politik. Peranan mereka tampak menonjol dalam kondisi masyarakat yang dilanda konflik struktural maupun konflik sosial.

Pareto merinci klasifikasi elite yang dibuat Mosca sebagai berikut:

- a. Elite yang memerintah, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemerintahan.
- b. Elite yang tidak memerintah, yang merupakan sisa yang besar dari seluruh elite. Masing-masing elite mempunyai kepentingan yang berbeda dalam usaha mereka menguasai atau mempengaruhi mereka.

## **BAB X        *PEMBANGUNAN POLITIK***

---

### **A. Pembangunan Demokrasi**

Demokratisasi adalah proses menuju demokrasi yang terdiri atas dua fase, yaitu transisi dan konsolidasi. Transisi meliputi peralihan dari bentuk pemerintahan non-demokrasi ke demokrasi, sedangkan konsolidasi adalah penguatan demokrasi pascatransisi hingga menjadi budaya masyarakat.

Menurut Sorensen, demokrasi meliputi tiga hal tahapan yang Pertama, tidak ada kelompok mayoritas atau lembaga kuat yang menentang keputusan demokratis. Kedua, perubahan sosial-ekonomi yang memperkuat dukungan terhadap pemimpin-pemimpin politik yang terpilih secara demokratis. Ketiga, lembaga dan praktik demokrasi mendarah-daging dalam budaya politik. Pinkey (1993) menyusun demokrasi ke dalam lima tipe, yaitu demokrasi radikal, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi konsoasional.

## **B. Pembangunan HAM Di Indonesia**

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia atau disingkat Ranham Indonesia adalah rencana kegiatan untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Kepres No. 40 Tahun 2004).

Dalam Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tersebut telah ditentukan 6 program utama Ranham Indonesia tahun 2004-2009 sebagai berikut.

- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM.
- b. Persiapan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional.
- c. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- d. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia.
- e. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## **C. Integrasi Nasional sebagai Fokus Pembangunan Politik**

Integrasi sosial menunjukkan suatu keadaan di mana individu-individu atau antar kelompok dalam masyarakat menyatu secara keseluruhan, teratur dan stabil. Durkheim, dan kemudian diperkuat oleh Parson, memandang bahwa agama sangat penting dalam mempertahankan integrasi dan solidaritas sosial. Namun demikian, suatu sistem nilai sekuler-misalnya Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat berfungsi sama dalam meningkatkan solidaritas dan integrasi sosial. Para ahli antropologi budaya juga telah berusaha menunjukkan bahwa pelbagai kebiasaan dan pola institusional menyumbang pada integrasi dan stabilisasi masyarakat.

Dalam upaya mengembangkan integrasi nasional, tidak boleh lepas dari konsensus dasar bangsa Indonesia. Konsensus dasar tersebut merupakan pilar utama pembangunan integrasi nasional. Oleh karena ada empat konsensus, maka disebut empat pilar nasional yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia.